

ANALISIS KELEMBAGAAN PROSES OPERASIONALISASI KPH: STUDI KASUS KPHP TASIK BESAR SERKAP DI PROVINSI RIAU

**Oleh: Eno Suwarno
(E161090031)**

Komisi Pembimbing:

**Prof Dr Ir Hariadi Kartodihardjo, MS
(Ketua)**

**Dr Ir Lala M Kolopaking, MS
(Anggota)**

**Dr Ir Sudarsono Soedomo, MS
(Anggota)**

**Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan
Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
Juli 2014**

SISTEMATIKA TULISAN

- PENDAHULUAN
- GAMBARAN RINGKAS KEBIJAKAN KPH & IAD-FRAMEWORK – Tdk dipresentasikan
- ANALISIS PENGARUH BIOFISIK DAN PERATURAN THD ATRIBUT KOMUNITAS DALAM PEMANFAATAN HUTAN DI AREAL KPH
- ANALISIS PERATURAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KPH
- HAMBATAN KELEMBAGAAN OPERASIONALISASI KPHP-TBS DI PROVINSI RIAU
- SIMPULAN UMUM DAN SARAN

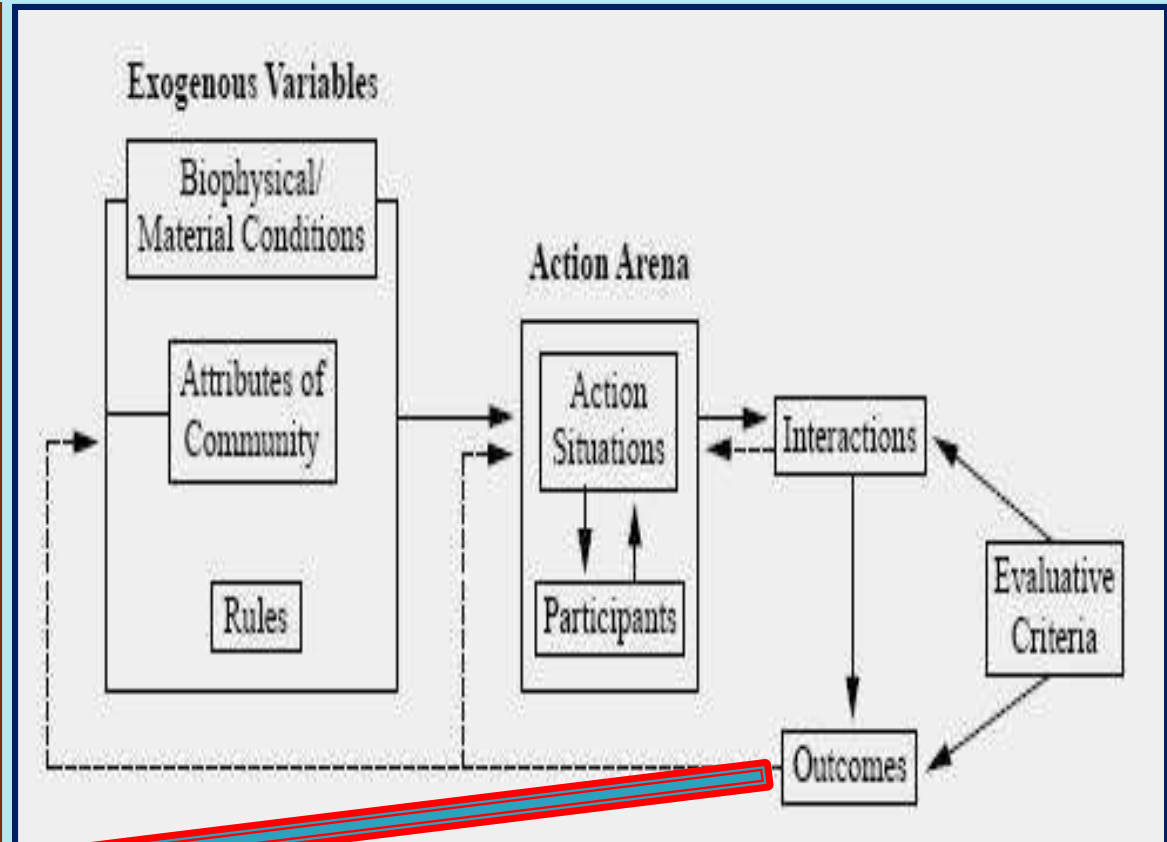
Bab 1 PENDAHULUAN

*IAD-
Framework
Ostrom*

Latar Belakang

Fakta Lapangan:

- Degradasi dan deforestasi
- Amanah UU 41/1999 -> membangun KPH, sbg penguatan sistem pengurusan hutan Ind
- 2009 -2020 : 600 KPH
- Wil kelola + Org. KPH
- KPHK, KPHP, KPHL
- Permendagri 61/2010, Org. KPHP & KPHL > Pemda.
- KPHP-TBS prov di Prov Riau. SK wilayah (31 Okt 2010), SK organisasi (31Okt 2011) >> Pnemptan Personil (hg Agt 2013 or 2 th lebih ?? **Lambat**

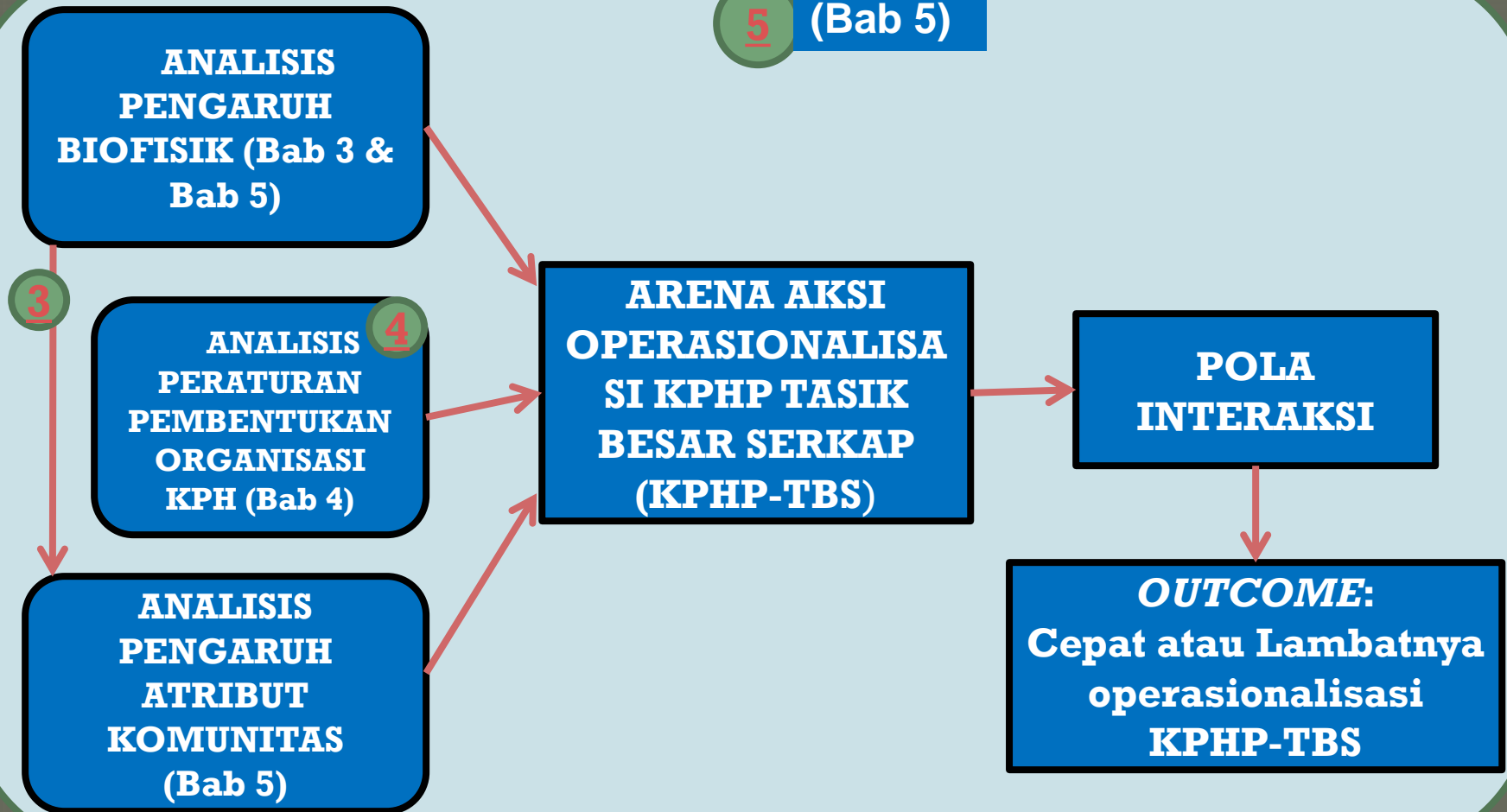


Tujuan Penelitian

TU: *“Menemukan masalah2 kelembagaan dan implementasi kebijakan yang menyebabkan terjadinya kelambatan beroperasinya organisasi KPHP–TBS.”*

Kerangka Penelitian

5 (Bab 5)



Bab 6 Simpulan Umum dan Saran

Simpulan Umum

- Kondisi biofisik terbukti mempengaruhi situasi aksi –dg struktur peraturan pemanfaatan hutan yang ada –cenderung membuka peluang dan menguatkan *conflict of interest* pd sebagian pejabat pemda (KKN). KPHP-TBS vs KPHL-RB.
- KKN > penghambat kuat pembangunan KPH. KPH dianggap sbg ancaman (al kewenangan dlm pengesahan RKTUPHHK-HTI – PP 6/2007 jo 6/2008 ps1 75).
- Peraturan pembentukan organisasi KPH (PP No. 6/2007 jo. PP No. /2008; PP No. 41/2007, dan Permendagri No. 61/2010) msh mengandung sejumlah kelemahan yg dpt menghambat proses-proses pembangunan KPH.
- Atribut komunitas yg paling penting dan cenderung menghambat pemb KPH adalah paradigma dan budaya. Ketika kebijakan KPH yang ada saat ini kurang memberikan tekanan dan daya dorong (insentif) kpd pemda, maka proses perubahan yang terjadi cenderung tidak dapat mengatasi resistensi yang ada.
- Dengan adanya masalah2 *conflict of interest*, kelemahan2 peraturan, dan masalah paradigma dan budaya, menyebabkan munculnya perilaku yang kurang dpt bekerjasama dari Pemprov Riau. Dimanifestasikan dg cara menunda-nunda penempatan personil untuk mengisi struktur organisasi KPHP–TBS. Di sisi lain, pendekatan Kemenhut blm diarahkan kpd menjawab permasalahan2 pokok tsb.

Saran

- Bantuan sarana prasarana, diklat, fasilitasi renja dll. unt mendukung operasionalisasi KPH msh perlu terus dilanjutkan; Namun perlu diiringi keb pencegahan dan penanggulangan korupsi; Guna meningkatkan penerimaan (*acceptance*) pemda, Kemenhut perlu merubah cara berfikir dan pendekatan kpd pemda (Perlu meningkatkan pembinaan kepada pemerintah daerah serta meningkatkan penyebaran pengetahuan, komunikasi, dan membangun rasa saling percaya).
- Berkaitan dg perbaikan peraturan:
 - Penetapan posisi-posisi seyogianya dirancang berdasarkan hasil analisis kebutuhan konfigurasi dan formasi partisipan dengan memperhitungkan relevansi serta kekuatan-kekuatannya.
 - Peran Kemendagri selaku pembina organisasi KPHL/KPHP perlu ditingkatkan.
 - Perlu adanya lembaga *ad hoc* non struktural yg berfungsi unt mengkonsolidasikan potensi dan mendorong peran para pihak dalam pembangunan KPH.
 - Ketidaksinkronan (pengaturan kewenangan) penetapan organisasi KPHL/KPHP antara PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008 dg Permendagri No. 61/2010 dpt diatasi dg merubah Pasal 8 PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008.
 - Guna mengatasi ketidakmufakatan, perlu diidentifikasi tahapan-tahapan krusial pengambilan keputusan di dalam suatu peraturan, lalu dibuat aturan agregasi.
 - Belum lengkap dan implementatifnya kriteria pada Permendagri Nomor 61/2010 dapat diatasi melalui penyempurnaan peraturan tsb.
 - Perlu ada satuan tugas yang berfungsi sebagai pusat informasi, komunikasi dan konsultasi KPH
 - Guna mendorong munculnya inisiatif daerah, kebijakan pembangun KPH saat ini perlu disertai dengan sejumlah kebijakan pemberian insentif yang menarik bagi pemerintah daerah.
- Implikasi teoritis, kerangka kerja IAD Ostrom sangat potensial digunakan sbg alat analisis kebijakan. IAD Ostrom terbukti efektif dalam menemukan masalah-masalah implementasi kebijakan serta memberikan arahan solusinya.

An aerial photograph of a wide river meandering through a vast, dense tropical rainforest. The river is dark and reflects the sky, with several small islands and peninsulas of forested land protruding into it. The forest is a rich green, and the overall scene is serene and natural.

TERIMA KASIH

Eno Suwarno (IPH 2009)